



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh

Corporate Communication PT Bio Farma

(Persero) Bandung, Jawa Barat

Skripsi

Oleh

Wynni Noveria Sari

2014310010

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh

Corporate Communication PT Bio Farma

(Persero) Bandung, Jawa Barat

Skripsi

Oleh
Wynni Noveria
2014310010

Pembimbing
Dr. Indraswari

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Wynni Noveria Sari
Nomor Pokok : 2014310010
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik Oleh Divisi Corporate Communication
PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana
Bandung, 15 Juli 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indraswari', with a horizontal line underneath.

Drs. Indraswari

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Trisno Sakti Herwanto', with a horizontal line underneath.

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wynni Noveria Sari

NPM : 2014310010

Jurusan Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Corporate
Communication PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa
Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juli 2020



Wynni Noveria Sari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik Program Studi
Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Wynni Noveria Sari
Nomor Pokok : 2014310010
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik oleh Corporate Communication PT Bio
Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana Pada
Jumat, 29 Juli 2020 Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

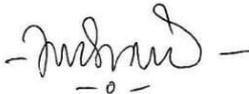
Ketua sidang merangkap anggota

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA

: 

Sekretaris

Dr. Indraswari

: 

Anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti., S.IP.,M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, Drs., M.Si., Ph.D.

Wynni Noveria_Cek plagiarisme BAB 1-6 Skripsi

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

ABSTRAK

Nama : Wynni Noveria Sari
NPM : 2014310010
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Oleh Divisi Coporate Communication PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat . Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini peneliti menggunakan Teori Implementasi George C Edward III yang terdiri dari 4 Indikator yaitu [1] Komunikasi [2] Sumber Daya [3] Disposisi [4] Struktur Birokrasi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis isi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada 3 informan seperti Kepala Bagian Corporate Communcation PT Bio Farma (Persero) dan staf, Kepala Bidang Pencegahan dan Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan studi dokumen resmi PT Bio Farma (Persero), UU KIP untuk menguji keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa [1] Aspek Komunikasi Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) telah melakukan komunikasi dengan baik dan jelas dengan internal maupun stakeholder, dalam proses komunikasi di internal telah menggunakan peran media elektronik yaitu intranet yang hanya bisa diakses oleh staff perusahaan dan juga masyarakat mudah mengakses penggunaan media elektronik seperti website perusahaan atau portal BUMN untuk update informasi kesehatan. [2] Aspek Sumber Daya Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) sangat mengedepankan kemampuan dan keterampilan karena Sumber Daya Manusia merupakan aset terpenting dari perusahaan dengan faktor pendukung Sumber Daya Finansial dan sarana dan prasarana. [3] Aspek Disposisi pada Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) telah menjalankan Standart Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyebarluasan informasi publik. [4] Aspek Stuktur Organisasi mempermudah Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) dalam pelimpahan wewenang karena adanya jenjang hierarki dan penyebaran wewenang menjadi lebih terstruktur dan jelas.

Kata kunci: Implementasi, Corporate Communication PT Bio Farma (Persero), Keterbukaan Informasi Publik, Komunikasi.

ABSTRACT

Nama : Wynni Noveria Sari
NPM : 2014310010
Judul : The Implementation of Law Number 14 of 2008 about Public Information Disclosure by Corporate Communication of PT Bio Farma (Persero) Bandung, West Java

This study attempts to look at the Implementation of Law Number 14 of 2008 about Public Information Disclosure by Corporate Communication of PT Bio Farma (Persero) Bandung, West Java. To achieve the objectives of this study, researchers used the George C. Edward III Implementation Theory which consisted of 4 Indicators namely [1] Communication [2] Resources [3] Disposition [4] Bureaucratic Structure.

This research is a qualitative descriptive study with qualitative content analysis. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews conducted with 3 informants such as the Head of the Corporate Communication Division of PT Bio Farma (Persero) and staff, the Head of Disease Prevention and Transmission Division of the Bandung City Health Office, the Secretary of the Bandung City Education Office, and study of official documents of PT Bio Farma. (Persero), UU KIP to test the validity of the data.

The results showed that [1] Aspects of Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) has communicated well and clearly with internal and stakeholders, in the internal communication process has used the role of electronic media, namely the intranet that can only be accessed by company staff and also the public easily accesses the use of electronic media such as company websites or BUMN portals to update health information. [2] Aspects of Corporate Communication Resources PT Bio Farma (Persero) prioritizes capability and skills because Human Resources is the most important asset of the company with supporting factors for Financial Resources and facilities and infrastructure. [3] Disposition Aspects of Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) has carried out Standard Operating Procedures (SOP) in accordance with the Law on Public Information Disclosure in the dissemination of public information. [4] Aspects of Organizational Structure make it easier for PT Bio Farma (Persero) Corporate Communication to delegate authority because of the hierarchical level and the distribution of authority to become more structured and clear.

Keywords: Implementation, Corporate Communication of PT Bio Farma (Persero), Disclosure of Public Information, Communication.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penelitian skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat“ guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penelitian ini tentunya penulis menemui berbagai kesulitan dan tantangan yang dialami. Namun, berkat dukungan serta bimbingan yang diperoleh dari banyak pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu dan Bapak yang selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi, yang selalu mendoakan, dan yang selalu menemani penulis pada saat menyusun skripsi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Pius Sugeng Prasetyo. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. Tutik Rachmawati, S.IP., MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Drs. Indraswari selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan masukkan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh Dosen, staff, karyawan administrasi, dan pekaya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan, yang telah banyak membantu penulis dalam mendukung kegiatan perkuliahan selama ini.
5. Keluarga besar dan teman-teman penulis, khususnya papah dan mamah yang selalu memberikan doa serta dukungan penuh ketika penulis menyusun skripsi.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Identifikasi Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
2. KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Administrasi Publik.....	11
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2.2.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	14
2.3 Peran <i>Corporate Communication</i>	17
2.3.1 <i>Corporate Communication</i>	17
2.3.2 Peran <i>Corporate Communication</i>	18
2.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	19
2.4.1 Keterbukaan Informasi Publik.....	21
2.5 Implementasi Kebijakan Publik.....	22
2.6 Model Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III.....	29

2.7	Model Penelitian	30
2.8	Operasional Variabel.....	31
3.	METODE PENELITIAN	35
3.1	Tipe Penelitian	35
3.2	Jenis Penelitian.....	37
3.3	Teknik Pengumpulan Data	39
3.3.1	Studi Dokumen	39
3.3.2	Observasi	40
3.3.3	Wawancara	41
3.4	Analisis Data.....	42
4.	PROFIL PENELITIAN	44
4.1	Sejarah PT Bio Farma (Persero) Bandung Jawa Barat	44
4.1.1	Kegiatan Usaha PT Bio Farma (Persero)	45
4.1.2	Visi dan Misi PT Bio Farma (Persero).....	45
4.1.3	Budaya Perusahaan PT Bio Farma (Persero).....	46
4.1.4	Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat	47
4.1.5	Struktur Bagian <i>Corporate Communication</i> PT Bio Farma (Persero)	48
4.1.6	Fungsi dan Tugas <i>Corporate Communication</i> PT Bio Farma (Persero)	49
4.2	Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Bandung Jawa Barat	53
4.2.1	Dinas Kesehatan Kota Bandung	53
4.2.2	Dinas Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	54
4.3	Dinas Pendidikan Kota Bandung	55
4.3.1	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.....	57
5.	PEMBAHASAN PENELITIAN	58

5.1	Analisis Implemetasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Divisi <i>Corporate Communication</i> PT Bio Farma (Persero) Kota Bandung	60
5.2	Faktor Komunikasi.....	68
5.3	Faktor Struktur Birokrasi.....	79
5.4	Faktor Disposisi	86
5.5	Faktor Sumberdaya	95
6.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
6.1	Kesimpulan.....	109
6.1.1	Komunikasi.....	110
6.1.2	Sumber Daya.....	111
6.1.3	Disposisi	112
6.1.4	Struktur Organisasi.....	112
6.2	Saran.....	113
	Daftar Pustaka	115
	Lampiran	120

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Sarana dan Prasaran Divisi <i>Corporate Communication</i> PT Bio Farma (Persero)	104
--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III.....	29
Gambar 2.2	Model Penelitian	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi <i>Corporate Communication</i> PT Bio Farma (Persero) Membawahi Bagian Sekretaris Perusahaan.....	48
Gambar 5.1	Halaman Utama Website Resmi PT Bio Farma (Persero)	66
Gambar 5.2	Blog Kesehatan Informasi Imunisasi PT Bio Farma (Persero)	67
Gambar 5.3	Struktur Organisasi PT Bio Farma (Persero) Tahun 2018	80
Gambar 5.4	Struktur Birokrasi <i>Corporate Communication</i> PT Bio Farma (Persero) Laporan Tahunan 2018.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara PT Bio Farma (Persero)	120
Lampiran 2. Panduan Wawancara Dinas Pendidikan Kota Bandung	124
Lampiran 3. Panduan Wawancara Dinas Kesehatan Kota Bandung	128
Lampiran 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik	131
Lampiran 5. Foto	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Di Indonesia akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28F. Oleh karena adanya Undang-Undang tersebut memperlihatkan bahwa hak atas informasi menjadi aspek penting dalam menciptakan serta menumbuhkan demokrasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan undang-undang yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Informasi publik yang harus disediakan oleh badan publik berdasarkan Undang-Undang tersebut yaitu; informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau, informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹

¹Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 Ayat 2.

Setiap badan publik yang wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik adalah kementerian, pemerintah provinsi, lembaga negara, lembaga non structural, BUMN, perguruan tinggi negeri, dan partai politik nasional. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan keterbukaan informasi publik, PT Bio Farma (Persero) sejak awal memproduksi bahan baku sekaligus vaksin polio untuk kebutuhan dalam dan luar negeri. Untuk dalam negeri, PT Bio Farma (Persero) mensuplai 90% kebutuhan vaksin pemerintah. Sedangkan untuk luar negeri, produk vaksin polio Bio Farma ditujukan untuk memenuhi vaksin negara-negara berkembang lainnya melalui UNICEF. PT Bio Farma (Persero) memiliki kewajiban untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 secara terbuka dalam setiap kinerjanya.

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang- Undang ini adalah: ²

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;

²Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 14.

- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
- n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Peneliti memilih PT Bio Farma (Persero) sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena PT Bio Farma (Persero) telah dikatakan berhasil meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2016 dari Komisi Informasi Pusat secara empat kali berturut-turut sejak tahun 2013. Dengan skor 81,27 PT Bio Farma meraih peringkat ke-3 untuk kategori badan publik BUMN.³ Dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan kinerjanya PT Bio Farma (Persero) selalu meningkatkan layanan informasi serta menyediakan akses informasi publik sesuai

³BUMN, 'Badan Usaha Milik Negara.' <http://bumn.go.id/> (21.12.16).

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka keikutsertaannya sebagai bagian dari tanggungjawab badan publik.

Keberhasilan perusahaan di mata masyarakat tidak terlepas dari peran *Public Relation* yang mempunyai tanggungjawab terhadap penciptaan, peningkatan, serta pemeliharaan citra positif perusahaan. Dalam hal ini salah satu divisi yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan adalah Corporate Communication Divisi Corporate Secretary. Maka dari itu PT Bio Farma (Persero) memiliki unit Corporate Communication yang merupakan bentuk saluran untuk memberikan informasi atau pemberitaan tentang perusahaan yang sangat beragam. Divisi tersebut bertanggungjawab memberikan informasi kinerja dari perusahaan. Keterbukaan informasi publik tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk pengawasan dari publik atau masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero).

Penghargaan tersebut merupakan sebuah prestasi bagi PT Bio Farma (Persero) yang telah memasuki kualifikasi informatif. Komisi Informasi Pusat di sepanjang tahun 2016 melakukan penilaian melalui Kuesioner Penilaian Mandiri atau Self-Assessment Questionnaire (SAQ) sebagai alat ukur bagi badan publik dalam menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan dengan melakukan kunjungan ke badan publik untuk mengukur pelayanan informasi publik, pengelolaan informasi dan dokumentasi badan publik. ⁴Keberhasilan yang telah dicapai oleh PT Bio Farma (Persero) dalam

⁴*Loc.cit.*

menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga turut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Melalui Program Imunisasi dalam memberikan informasi kesehatan dan vaksinasi di kota Bandung yang pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui sejauhmana informasi tentang vaksinasi dan pelaksanaan imunisasi dilakukan sampai kepada masyarakat dengan keikutsertaan adanya peran dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sebagai pihak yang berperan langsung dalam memberikan informasi vaksinasi dan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan dan pelaksanaan imunisasi. Divisi *Corporate Communication* PT Bio Farma (Persero), yang pada pelaksanaan program imunisasi membawahi dua bidang seksi yang bertugas menjalankan implementasi keterbukaan informasi kepada publik yaitu Seksi Internal dan Seksi Eksternal. Kedua bidang seksi internal ini memiliki dua kegiatan penyebarluasan informasi yaitu dengan kegiatan *Online* dan kegiatan *Offline*. Pertama dalam kegiatan *Online* dengan mengelola *website resmi, blog kesehatan, portal BUMN, Intranet, klipng berita, dan majalah* yang dalam penyampaiannya informasi kesehatan diberikan secara online untuk memudahkan masyarakat mengetahui informasi kesehatan dan dapat diakses langsung oleh masyarakat dan pemohon informasi. PT Bio Farma (Persero) memberikan informasi kesehatan berupa artikel-artikel yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Kedua yaitu kegiatan *Offline* Program Imunisasi dengan melakukan kegiatan *sosialisasi, seminar, dan workshop* seputar kesehatan dan imunisasi.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma (Persero) memiliki tanggungjawab perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan

dengan masyarakat. Tanggungjawab sosial perusahaan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai sebuah bentuk mandatori berdirinya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam menjalankan bisnisnya pula dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik. Dengan menjalankan program CSR atau *Corporate Social Responsibilities* sebagai bentuk tanggungjawab sosial PT Bio Farma (Persero) berkomitmen untuk mengembangkan sosial ekonomi masyarakat di lingkup perusahaan yang merujuk pada kontribusi terhadap masyarakat yang lebih baik dan mengintegrasikan kepentingan sosial dalam operasi bisnis yang dijalankan PT Bio Farma (Persero).

Informasi publik tentang kesehatan yang diberikan PT Bio Farma (Persero) merupakan kegiatan aktivitas komunikasi dimana informasi disampaikan untuk mempermudah pemohon informasi publik dengan cepat. Untuk itu pada bidang dalam badan publik yang wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik yaitu unit di bagian Komunikasi Perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan unit Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) yang berperan penting mencapai tujuan badan publik. Tujuannya adalah untuk membina hubungan dengan stakeholder dan menyampaikan visi, misi, dan kebijakan, program, maupun kegiatan badan publik secara terbuka kepada masyarakat.

Peran unit Komunikasi Perusahaan dalam implementasi keterbukaan informasi publik tercantum pada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 7 yang menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada

pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, kemudian badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan yang dimaksud yaitu memuat pertimbangan politik, ekonomi, social, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara, dan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban informasi badan publik dapat pula memanfaatkan sarana media elektronik dan nonelektronik.⁵

Dalam penelitian ini, terdapat tanggungjawab implementasi oleh Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) Kota Bandung yang dalam pengimplementasiannya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat beberapa variabel yang peneliti gunakan sebagai berikut, pertama komunikasi (konsistensi, kejelasan, transmisi), sumber daya (manusia, finansial, dan sarana dan prasarana), disposisi (tanggungjawab, SOP), dan struktur birokrasi (hierarki, penyebaran tanggungjawab). Peneliti mengidentifikasi bahwa dalam pengimplementasian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) memiliki permasalahan pada Disposisi. Bahwa saat melakukan penelitian, peneliti menemukan adanya permasalahan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang tidak banyak melibatkan Divisi Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) dalam perancangannya. Seharusnya keterlibatan perancangan SOP ini dimaksudkan agar bagian internal perusahaan lebih mengetahui secara pasti yang harus dan tidak harus dilakukan saat menjalankan implementasi kebijakan.

⁵Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7.

Sebagai Badan Usaha Negara yang berkewajiban menyebarluaskan informasi perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang, PT Bio Farma (Persero) dalam penyampaian informasi publik secara terbuka dilakukan tentunya dengan aktivitas komunikasi oleh Corporate Communication. Yang dimana kegiatan komunikasi tersebut disampaikan mengacu kepada arahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang akhirnya dapat diterima oleh masyarakat dan pemohon informasi. Kegiatan komunikasi tersebut tidak terlepas dari penggunaan media komunikasi untuk mempermudah penerimaan informasi kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Hal ini dibuktikan pada pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dikatakan bahwa divisi/unit bidang informasi komunikasi, dan/atau kehumasan diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan keterbukaan informasi dalam suatu badan publik.⁶

PT Bio Farma (Persero) selaku BUMN, sangat mengedepankan sumberdaya manusia yang dimiliki. Karena perusahaan berkeyakinan bahwa asset terpenting dalam keberlangsungan jalannya sebuah perusahaan adalah manusia yang unggul terampil dan kompeten. Ini dibuktikan dengan dalam Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) bahwa dalam kegiatannya perusahaan memfasilitasi kegiatan offline seperti seminar, workshop pengembangan diri dan juga teknologi untuk menambah keterampilan tenaga perusahaan agar dapat memajukan perusahaan sesuai visi dan misi yang dimiliki.

⁶ 'Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 21.'

Kemudian dalam proses penyebaran tanggungjawab perusahaan, Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) bertanggungjawab penuh terhadap informasi yang akan disebarakan kepada masyarakat. Karena informasi yang nantinya diberikan kepada masyarakat, sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Sekretasi dan Direksi Perusahaan yang juga bertugas sebagai pengawas kinerja yang dilakukan Corporate Communication.

George C Edward III mengatakan jika variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan stuktur birokrasi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Maka jika suatu implementasi kebijakan tidak berjalan efektif berarti dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan oleh pelaksana kebijakan atau stakeholders. Dengan begitu, disposisi dalam implementasi juga menjadi penting dalam tanggungjawab dan wewenang pelaksanaannya juga melibatkan pelaksana kebijakan dalam proses perancangan SOP yang dibutuhkan.

Karena peneliti beranggapan bahwa terdapat keunggulan dari keempat variable yang saling berhubungan tersebut. Adanya komunikasi yang dibutuhkan perusahaan untuk menciptakan komunikasi yang jelas dan konsisten dengan stakeholders lain yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Adanya sumberdaya seperti manusia, finansial, dan sarana prasaran sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pencapaian tujuan perusahaan sesuai dengan visi misi yang dimiliki. Faktor struktur birokrasi juga banyak mempengaruhi bagaimana Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) bertanggungjawab atas penyebaran informasi kepada masyarakat. Dan adanya disposisi bahwa pelimpahan wewenang kebijakan kepada stakeholders lain yang juga

membutuhkan koordinasi yang baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan perjanjian kerjasama kedua pihak.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana peran divisi corporate communication dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) Bandung yang erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH CORPORATE COMMUNICATION PT BIO FARMA (PERSERO) BANDUNG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian yang telah disampaikan oleh peneliti diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana unit corporate communication menjalankan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi di PT Bio Farma (Persero) Bandung, Jawa Barat?”

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dituliskan peneliti sebelumnya yang didapat dari temuan di lapangan, hasil wawancara, dan juga observasi maka peneliti menuliskan identifikasi masalah sesuai dengan teori yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana unit corporate communication PT Bio Farma (Persero) menjalankan faktor komunikasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik?

⇒ Dari hasil temuan peneliti dilapangan dan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) secara berkala melakukan kegiatan rapat rutin dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk membicarakan sejauhmana progress dari Program Imunisasi dilaksanakan.

b. Bagaimana faktor sumber daya menentukan keberhasilan jalannya implementasi keterbukaan informasi publik oleh unit corporate communication di PT Bio Farma (Persero)?

⇒ Sumberdaya manusia yang dimiliki Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) berjumlah 24 orang termasuk juga Kepala Bagian. Sumberdaya finansial cukup untuk menjalankan kebijakan sesuai Undang-Undang. Sumberdaya sarana dan prasarana cukup lengkap dan baik seperti adanya ketersediaan komputer, ruang tamu, transportasi untuk kebutuhan diluar perusahaan, ketersediaan mesin fotokopi dan perpustakaan.

c. Bagaimana faktor disposisi mendukung unit corporate communication di PT Bio Farma (Persero) dalam implementasi keterbukaan informasi publik?

⇒ Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) membutuhkan peran dari stakeholders lain yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas

Kesehatan untuk menjalankan Program Imunisasi berdasarkan tugas pokok sesuai perjanjian kerjasama yang dibuat.

- d. Bagaimana faktor struktur birokrasi mempengaruhi peran divisi corporate public relations dalam menjalankan implementasi keterbukaan informasi publik?

⇒ Struktur birokrasi dari Corporate Communication PT Bio Farma (Persero) memiliki 1 kepala bagian yang membawahi 3 seksi yaitu 1 kepala seksi internal, 1 kepala seksi eksternal, dan 1 kepala seksi perpustakaan. 3 seksi membawahi masing-masing 3-4 staf yang pada struktur birokrasi ini tidak banyak mengalami kendala.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis uraikan, maka tujuan dari penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di PT Bio Farma (Persero) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran unit corporate communication di PT Bio Farma (Persero) menjalankan keterbukaan dan transparansi dalam implementasi keterbukaan informasi publik;
- b. Untuk mengetahui faktor akuntabilitas mempengaruhi peran unit corporate communication di PT Bio Farma (Persero) dalam implementasi keterbukaan informasi publik;
- c. Untuk mengetahui faktor efektifitas dan efisiensi dalam mendukung peran unit corporate communication di PT Bio Farma (Persero) dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

1.5 Kegunaan Penelitian

Secara akademis kegunaan dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah, instansi yang terkait, masyarakat dalam pengembangan teori dan praktek di bidang ilmu administrasi publik khususnya terkait dengan implementasi kebijakan publik.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan bagi PT Bio Farma (Persero) terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi. Kemudian dapat melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh PT Bio Farma (Persero).

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai penulisan penelitian skripsi dan pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai pengertian administrasi publik, pengertian kebijakan publik, tahap-tahap kebijakan publik, peran corporate communication, undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, penjelasan mengenai keterbukaan informasi publik, dan implementasi kebijakan publik serta teori dan model penelitian yang digunakan oleh penulis

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai tipe penelitian yang digunakan serta jenis penelitian yang digunakan peneliti maupun teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumen, dan observasi

BAB IV OBJEK PENELITIAN

Menjelaskan mengenai objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Kepala Bagian Corporate Communication, jajaran staff dalam kinerjanya mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Infomrasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan pembahasan dalam bentuk data sebagaimana yang telah dijelaskan peneliti pada bab 3

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan saran yang diberikan peneliti untuk menjadi bahan evaluasi dan meningkatkan transparansi dan keterbukaan tentang informasi publik